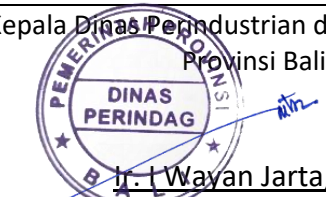




ບົຍນິສຸງຸປຸວນິສຸງ  
**PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
ຂໍຂສນິບົຍນິສຸງຸປຸວນິສຸງ  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
ຄຸນສນິກຸມ ປຸປຸສນິສຸງ ຂໍຂສນິບົຍນິສຸງຸປຸວນິສຸງ (ບົຍນິສຸງຸປຸວນິສຸງ) ປຸປຸສນິສຸງ  
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA DENPASAR BALI (80235), TELEPON (0361) 223096,  
WEBSITE : [www.disperindag.baliprov.go.id](http://www.disperindag.baliprov.go.id)

<b>Nomor SOP</b>	B.32.061/2459/SEKRET/DISPERINDAG
<b>Tanggal Pembuatan</b>	1 Maret 2023
<b>Tanggal Revisi</b>	
<b>Tanggal Efektif</b>	1 Maret 2023
<b>Disahkan Oleh</b>	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali  <b>Ir. I Wayan Jarta, MM</b> 19641111 198603 1 023
<b>Nama SOP</b>	Pendokumentasian Daftar Informasi Publik

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026).Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
8. Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
10. Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
13. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali;

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan serta Mendokumentasikan Daftar Informasi Publik
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan koordinasi secara aktif
3. Memiliki Surat Tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik dari PPID Pemerintah Provinsi Bali

<p><b>Keterkaitan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat</li> <li>2. Pedoman penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PPID Utama dan PPID Pembantu</li> <li>3. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat</li> <li>4. Pemohon informasi</li> <li>5. PPID Utama dan PPID Pelaksana</li> </ol>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembar Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>• Kerangka Acuan Kerja</li> <li>• Term of Reference</li> <li>• Alat Tulis Kantor</li> <li>• Jaringan Internet</li> <li>• Komputer dan Printer</li> </ul>
<p><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila DIDP tidak tersusun sesuai target dan di umumkan ke publik maka akan ada pengajuan Keberatan Informasi dari Masyarakat</li> </ul>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disimpan sebagai data elektronik dan manual</li> </ul>

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP) KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan	
		Petugas Pelayanan	PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	PPID pelaksana menyusun dan mengumpulkan DIP dan diterima oleh petugas pelayanan untuk di rekap selanjutnya di ajukan ke PPID untuk di koreksi. Bila tidak ada koreksi di ajukan ke Atasan PPID untuk di sahkan dalam bentuk SK.					Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Surat Keputusan Atasan PPID tentang DIP Pemerintah Provinsi Bali		
2	Bila ada koreksi PPID mengembalikan ke petugas pelayanan untuk di tindak lanjuti ke PPID Utama.					Draf koreksi DIP PPID Pelaksana	Tentatif	Hasil koreksi DIP		
3	DIP yang sudah di sahkan Atasan PPID untuk di dokumentasikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy untuk disebarluaskan dan di publikasikan melalui website PPID dan Badan Publik.						Nota Dinas dan Draf DIP	Tentatif	Surat pengantar DIP	